

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

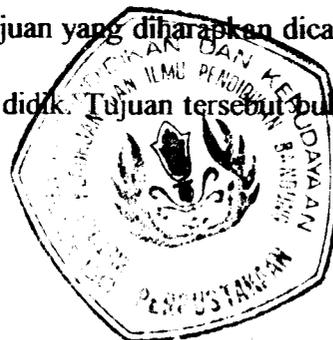
Pendidikan formal yang dilaksanakan di tiap jenis dan jenjang sekolah, pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas. Tujuan Pendidikan Nasional ini secara tegas dinyatakan dalam Bab II, pasal 4 Undang-Undang No.2 tahun 1989 ; tentang sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut :

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Tn, 1993 : 4).

Penjelasan lebih rinci tentang hal ini, dituangkan dalam GBHN/TAP No.II/1998 tentang Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa :

Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemandirian mantap dan mandiri.

Dalam uraian di atas dapatlah kita cermati bahwa dengan tegas tersurat bahwa pendidikan nasional bertujuan mencapai pengembangan manusia dengan seutuhnya. Tujuan Pendidikan Nasional tersebut menggambarkan tujuan yang diharapkan dicapai oleh setiap warga negara yang berstatus sebagai peserta didik. Tujuan tersebut bukan



hanya untuk sekelompok peserta didik tertentu, yang menggeluti suatu bidang spesialisasi tertentu, melainkan oleh semua peserta didik ditiap jenis dan jenjang sekolah. Tujuan itupun tidaklah dapat dicapai oleh pendidikan yang hanya menekankan aspek intelektual (kecerdasan) atau keterampilan tertentu saja, karena tujuan tersebut menggambarkan keterpaduan dari berbagai ranah (domain), oleh karenanya tujuan pendidikan yang bersifat umum yang mengintegrasikan seluruh ranah atau seluruh aspek kepribadian.

Didalam GBHN secara jelas disebutkan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa membina kepribadian manusia yang terpadu, menurut konsep GBHN adalah membina manusia Indonesia seutuhnya. Terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya itulah yang diharapkan dapat dicapai oleh tujuan pendidikan nasional. Manusia Indonesia seutuhnya itu secara singkat dapat digambarkan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang terpadu (terpadunya kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor) dan terpadunya jasmani dan rohaninya. Apa yang dikemukakan di atas menggambarkan konsep pendidikan umum (general education), menurut konsep GBHN.

Dalam Dictionary of Education (1973 : 250), general education diartikan sebagai : “ (1) Those phases of learning which should be the common experience of all men and women, (2) education gained throught dealing with the personal and social problems with which all are confroted of Education (1977:146), sedangkan

menurut general education diartikan sebagai : “ (1) areas of knowledge and experience which should be common to all pupils, (2) a non examinable curriculum or syllabus, as in sixth form general studies when one may study subjects such as philosophy or politics, (3) education that prepares a student to take a responsible place in society and to appreciate his/her own work in the context of society's of needs ”.

Dua pengertian atau definisi pendidikan umum tersebut di atas, sudah memberikan gambaran tentang pendidikan umum, sekalipun belum memberikan gambaran yang lengkap. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan umum merupakan bidang pengetahuan dan pengalaman belajar yang harus diberikan atau harus diikuti secara umum oleh semua peserta didik, laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya pengertian general education, menurut Philip H. Phenix (1964 : 5) adalah “ ... general education is the process of engendering essential meanings ”. Pernyataan tersebut didasarkan bahwa setiap manusia perlu memahami makna yang esensial yang diperlukan bagi pembentukan dirinya sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang terpadu dan menyeluruh (whole person).

Sementara itu menurut Albery and Albery (1965), tujuan pendidikan umum adalah “ ... is assential to development of the common values, attitudes, understanding, and skills by all for common democratic citizenship ”. Menurutnya bahwa pendidikan umum bertujuan mengembangkan seluruh kepribadian peserta didik secara utuh, agar mereka menjadi warga negara yang baik dan demokratis.

Sedangkan perilaku-prilaku yang dimaksudkan oleh general education

menurut Konsep GBHN berdasarkan rumusan UUSPN No. 2 tahun 1989 pasal 39

(ayat 2) adalah sebagai berikut :

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Perilaku-perilaku yang tercantum dalam UUSPN di atas di persekolahan dapat dibina melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) yang menjadi kaedah dasar dari seluruh kurikulum karena harus bersumber kepada Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai dengan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapatlah disimpulkan general education ditemukan dalam rumusan tujuan Pendidikan Nasional yang menjadi rujukan bagi semua jenis dan jenjang, sekolah dan program pendidikan di Indonesia.

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur

dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk prilaku dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warga negara dan makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini sesuai dengan tujuan kurikuler Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dasar adalah :
“mananamkan sikap prilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dan memberikan bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (kurikulum SD 1994).

Melihat tujuan dan esensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) sebagai pendidikan nilai dan moral maka di sekolah dasar, seyogyanya penyelenggaraan pembelajaran PPKN mampu mempersiapkan, membina, dan membentuk kemampuan peserta didik yang menguasai pengetahuan sikap, nilai, dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupan di masyarakat (Kosasih : 1992). PPKN memiliki peran sebagai Pendidikan Nilai dan Moral Pancasila, sebagai Pendidikan Politik, sebagai Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan maka PPKN cenderung merupakan Pendidikan Afektif atau Pendidikan Nilai-Moral maka guna mencapai peran PPKN di atas kemampuan yang harus dikembangkan kepada peserta didik selama mengikuti program pendidikan pada Sekolah Dasar meliputi :

- “- mengemukakan beberapa contoh prilaku
- mengikuti/mencontoh berbagai prilaku
- menjelaskan dan melaksanakan perbuatan baku dalam kehidupan sehari-hari
- melakukan berbagai hal yang dituntut oleh kepatuhan nilai moral
- menjelaskan, mencoba dan berupaya menyesuaikan prilaku dengan mendasarkan pada nilai-nilai bangsa (lingkungan)

- meyakinkan dan dapat berperilaku sesuai dengan tuntutan aturan lembaga pemerintahan.” (A.Azis Wahab ; 1996 : 9)

A. Azis Wahab (1996 : 12) mengatakan bahwa untuk mengembangkan materi PPKN, kiranya patut memperhatikan tradisi pengajaran ilmu-ilmu sosial/studi sosial di sekolah mengingat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu tujuan utama pengajaran ilmu-ilmu sosial, dan oleh sebab itu pembahasan materi PPKN harus senantiasa dikaitkan dengan tradisi tersebut.

Sebagai bahan perbandingan dalam penulisan tesis ini dikemukakan tradisi social science education-social studies di Amerika Serikat analog dengan PIPS di Indonesia.

a) Social Studies Taught as Citizenship Transmission

Purpose : Citizenship is best promoted by inculcating right values as a framework for making decisions.

Method : Transmission, transmission of concepts and values by such techniques as textbook, recitation, lecture, question and answer session, and structured problem solving exercises.

Content : Content is selected by an authority interpreted by the teacher and has the function of illustrating values, beliefs, and attitudes.

b) Social Studies Taught as social Science

Purpose : citizenship is best promoted by decision making based on mastery of social science concepts, processes, and problems.

Method : Discovery, each of the social sciences has its own method of gathering and verifying knowledge. Students should discover and apply the method that is appropriate to each social science.

Content : Proper content is the structure, concepts, problems, and processes of both the separate and the integrated social science disciplines.

c) Social Studies Taught as Reflective Inquiry

Purpose : Citizenship is best promoted through a process of inquiry in which knowledge is derived from what citizens need to know to make decisions and solve problems.

Method : Reflective Inquiry, decision making is structured and disciplined through a reflective inquiry process which aims at identifying problems and responding to conflicts by means of testing insights.

Content : Analysis of individual citizen's values yields needs and interests which, in turn, form the basis for student self-selection of problems. Problems,

therefore, constitute the content for reflection. (Barr, Barth, and Shermis ; 1977 : 67)

Selanjutnya Barr, Barth, and Shermis (1977:81) mengemukakan the *Cityzenship Transmission* teacher attempts to transmit a set of basic information and values that are felt to comprise the core values of the society (or, of course, the core values of a particular subgroup of the pluralistic society). These beliefs then become a standard for evaluating and processing information; i.e., the core values are used as a standard for determining the truthfulness or goodness of action and events. As such, the core values act as a filter to screen one's perceptions.

Memperhatikan tradisi dan tujuan PIPS serta pengertian PIPS di atas maka dalam penulisan tesis ini pengertian dipakai adalah PIPS dianggap sebagai PPKN yang merujuk kepada tujuan pendidikan nasional (USPN No. 2 1989). Di Negara Republik Indonesia penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan kepada siswa, dapat dilakukan melalui pengajaran PPKN, dengan pengajaran PPKN diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat secara utuh dan bulat dijadikan pola berfikir dan prilaku. Oleh karena itu, dalam pengajarannya tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tentang Pancasila, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah mengembangkan, membina, dihayati, dan diamalkan dalam bentuk prilaku sehari-hari, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat (Depdikbud, 1994).

Sesuai dengan penjelasan diatas dapatlah kita cermati rumusan tujuan kurikuler PPKN SD adalah : "menanamkan sikap prilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dan memberikan bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan SLTP.

Selama ini pelaksanaan program PPKN masih mengalami berbagai hambatan dan permasalahan sebagai mana yang dikemukakan oleh Nu'man (1995) mengatakan

bahwa masalah dan kekeliruan yang timbul dalam pelaksanaan program semacam PPKN karena sifat substansinya sebagian besar berisikan konsep yang secara konstitusional sudah resmi menjadi moral bangsa. Lebih lanjut dikatakan bahwa, guru-guru untuk mudahnya cenderung menggunakan method of authority dan ceramah, yaitu metode belajar yang hanya mengandalkan wibawa guru dan kurang berdasarkan atas pertimbangan teori belajar. Guru menuntut agar isi pelajaran dan buku wajib untuk dikuasai peserta didik karena itu, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa isi dan metoda PPKN itu sangat membosankan karena hanya untuk dihafalkan saja (Depdikbud, 1994).

Kondisi seperti di atas menyebabkan pengajaran PPKN di sekolah menjadi kurang bermakna bagi siswa, serta minat dan motivasi belajar siswa menjadi rendah. Semua itu akan bermuara pada rendahnya prestasi belajar siswa dalam pengajaran PPKN. Ini terungkap dari beberapa hasil penelitian. Diantaranya ada studi yang dilakukan oleh Sunarno (1992 ; 10). Mengatakan bahwa :

- a. PBM belum mencapai tujuan PPKN yang diharapkan,
- b. guru baru memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila kepada siswa,
- c. guru belum mengembangkan dan membina siswa yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari,
- d. guru pembina PPKN masih banyak menekan aspek pengetahuan siswa tentang nilai-nilai Pancasila,
- e. guru belum membina sikap dan tingkah laku siswa secara nyata sehingga siswa belum tergugah hati nuraninya untuk mengamalkannya.

Sementara itu hasil studi Nasution (1992) yang dilakukan terhadap siswa sekolah di Bogor menemukan bahwa nilai atau hasil maksimal yang dicapai untuk mata pelajaran matematika tidak jauh berbeda dengan hasil maksimal yang dicapai

siswa dalam mata pelajaran PPKN dan IPS. Bahkan yang sulit dimengerti dari hasil studi itu adalah bahwa nilai terburuk siswa secara perorangan justru bukan pada mata pelajaran matematika, melainkan pada mata pelajaran PPKN dan IPS. Berkaitan dengan pola pengajaran, penelitian Anwar (1997) menemukan bahwa pola pengajaran yang dilakukan guru PPKN lebih bersifat pemberian pengetahuan tentang Pancasila daripada pembinaan moral dan sikap siswa.

Berdasarkan analisis konseptual dan kondisi pendidikan PPKN di Sekolah Dasar, ternyata masih banyak guru yang belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam memilih, serta menggunakan berbagai metoda pengajaran yang mampu mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif bagi siswa untuk belajar, dan banyak diantara guru yang tidak memiliki kurikulum tertulis yang merupakan pedoman dasar dalam pemilihan metoda pembelajaran (Hamid Hasan ; 1988). Disamping itu tidak sedikit siswa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan metoda pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh guru dirasakan kurang tepat (A.Azis Wahab ; 1986). Dengan demikian proses belajar mengajar akan berlangsung secara kaku, sehingga kurang mendukung pengembangan pengetahuan, sikap, moral dan keterampilan siswa (Hamid Hasan ; 1996).

Pemilihan pendekatan dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan petensi siswa merupakan kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru (Kosasih ; 1992). Hal ini didasari oleh asumsi bahwa ketepatan guru dalam memilih pendekatan dan metoda pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan hasil belajar siswa (Jarolimek ; 1967), karena pendekatan

dan metoda pengajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar yang dilakukannya (A.Azis Wahab ; 1986).

Berdasarkan uraian diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa pengajaran PPKN selama ini masih belum memenuhi harapan, baik dilihat dari segi proses maupun hasil perolehannya. Bahan ajar PPKN selama ini masih padat dengan konsep normatif teoritik dengan pola penilaian yang seluruhnya formal di kelas (Kosasih, 1994). Hal ini mungkin disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang dianut guru didasarkan atas asumsi tersembunyi, bahwa PPKN adalah pengetahuan tentang Pancasila yang dapat secara utuh disampaikan dari pikiran guru kepikiran siswa. Atas asumsi itu, mungkin saja guru merasa telah mengajar dengan baik namun siswanya tidak belajar. Dalam arti belum terjadi proses internalisasi nilai sebagai misi dan ciri dari PPKN yang pada hakikatnya adalah pendidikan nilai, moral dan norma Pancasila (Kosasih, 1994).

Dari studi pendahuluan yang dilaksanakan oleh peneliti di SD Isola I, maka peneliti memperoleh gambaran bahwa permasalahan secara umum dihadapi dalam pembelajaran PPKN selama ini, tampaknya terjadi pula dalam pembelajaran PPKN pada Sekolah Dasar Negeri Isola I di Kotamadya Bandung. Hal tersebut terungkap dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Sekolah Dasar yang bersangkutan dalam rangka menyusun rancangan penelitian ini.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar dalam pembelajaran PPKN merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satu pendekatan yang sesuai dengan model

pendidikan nilai (PPKN) yang diduga dapat menjembatani keresahan tersebut. Pendekatan Analisis Nilai. Untuk itu melalui penelitian ini, mencobakan pendekatan yang sesuai dengan model pendidikan nilai (PPKN) adalah dengan Implementasi Pendekatan Analisis Nilai, yaitu dimana siswa diajak melakukan Analisis Nilai melalui media stimulus sajian. Dalam Implementasi Pendekatan Analisis Nilai merupakan operasionalisasi proses afektual emoting, minding, spiritualisasi, dan valuing sesuatu dari berbagai dimensi sumber nilai, moral, norma serta lingkaran kehidupan (life cycles). Menurut S. Nasution (1989 : 133) pembinaan tingkah laku siswa dimulai dengan pengenalan terhadap stimulus kepada siswa. Stimulus itu selanjutnya dikaji bersama, pengkajian ini akan melahirkan kepercayaan, sikap, nilai, standar moral, itikat dan kelakuan baru. Pendekatan pembelajaran ini terangkat dari dasar pemikiran “getting better together” yang menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana yang kondusif kepada siswa untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan-keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya dalam masyarakat. Dalam pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Analisis Nilai bukan hanya belajar dan menerima apa yang disajikan oleh guru dalam pembelajaran, melainkan bisa juga belajar dari siswa lainnya, dan sekaligus mempunyai kesempatan untuk membelajarkan siswa lainnya.

Proses pembelajaran dengan Pendekatan Analisis Nilai dapat membantu siswa yang berprestasi rendah menjadi berhasil, anak yang apatis dan kurang agresif menjadi lebih bersemangat dan energik (Howe & Kirschebaum, 1977). Pada saat siswa



belajar, siswa dapat mengembangkan aspek-aspek moral yang dimiliki siswa dan membandingkan dengan nilai yang dianut kelompok lain, evaluasi terhadap nilai yang dianut seseorang dengan segera, sehingga dapat dicari alternatif pemecahan masalah serta membangun keyakinan dan kepedulian atas dasar nilai tersebut (Fraenkel ; 1997 : 116). Pada pendekatan ini guru bukan berperan lagi sebagai satu-satunya nara sumber dalam pembelajaran, melainkan berperan sebagai mediator, stabilisator, dan manajer pembelajaran. Iklim pembelajaran yang berlangsung dalam suasana keterbukaan dan demokratis akan memberi kesempatan yang optimal bagi siswa untuk memperoleh informasi lebih banyak mengenai materi yang dibelajarkan dan sekaligus melatih sikap dan keterampilan sosialnya sebagai bekal dalam kehidupannya dimasyarakat, sehingga perolehan dan hasil belajar siswa akan semakin meningkat, disamping itu iklim belajar mengajar berkembang akan merangsang kemampuan berfikir siswa, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar (Nu'man ; 1998).

Pengajaran dengan Implementasi Pendekatan Analisis Nilai dalam PPKN dirasakan cukup relevan karena PPKN juga bertujuan mengembangkan kompetensi/kopetensi dasar warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan sebagai warga negara. Pelatihan yang dibutuhkan meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan agar kualitas partisipasinya sebagai warga negara benar-benar dapat diandalkan. Pola dan pendekatan pengajaran afektif dapat diharapkan menuntun para guru umumnya dan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Pendidikan Agama dan sejenisnya untuk mulai memperhitungkan, memperhatikan, membimbing dan membakukan anak

didiknya 'menghidupkan/memfungsionalkan' suara potensi afektifnya (Djawad Dahlan 1995: 2).

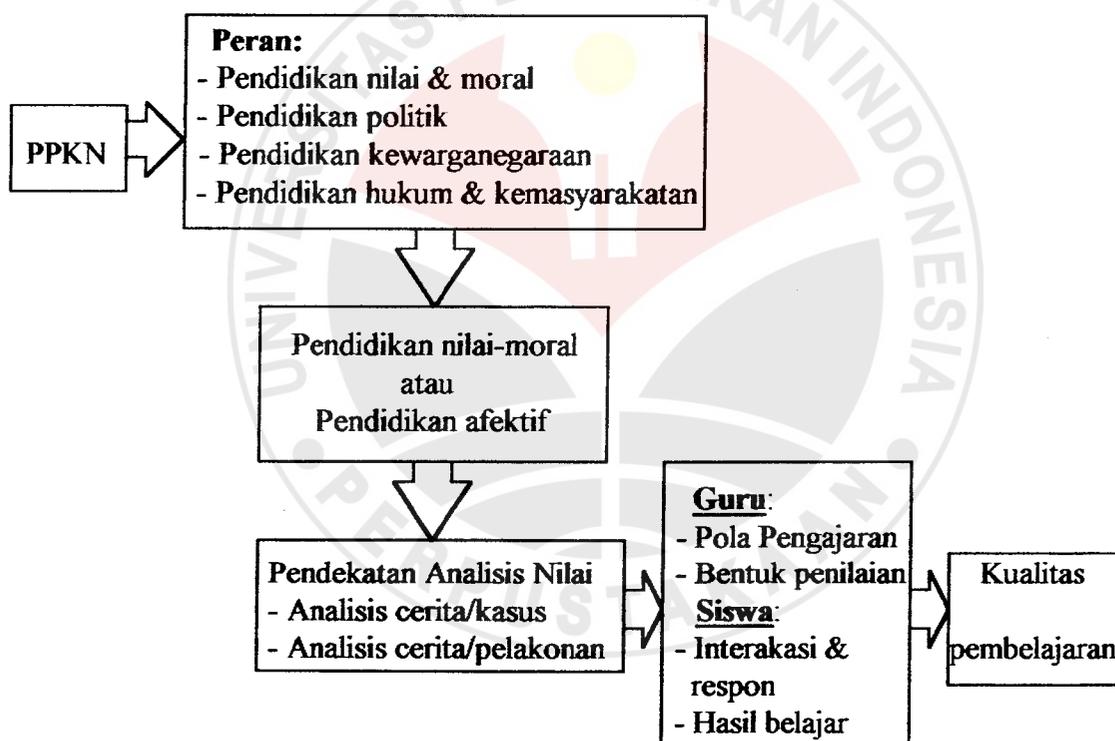
Berbagai temuan terdahulu menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan pendidikan afektif (Pendekatan ANNIL & VCT) hasil belajar yang diperoleh siswa lebih meningkat (Jonkenedi ; 1994 : 161). Di samping itu Pendekatan ANNIL memberi peluang untuk mengetahui secara langsung tingkat penghayatan seseorang terhadap nilai yang ingin ditanamkan dan selanjutnya penguatan (Reinforcement) segera dapat ditanamkan untuk terjadinya unjuk prilaku positif. Dengan demikian, modifikasi terhadap penampilan negatif dapat dilakukan secepatnya (Hans & Cynthia ; 1993).

Hasil-hasil penelitian di atas, mengisyaratkan bahwa penggunaan Pendekatan ANNIL dapat menjembatani keresahan mengenai masalah kualitas pembelajaran PPKN yang selama ini dirasakan belum optimal.

Dari permasalahan dan temuan hasil penelitian di atas maka cukup relevan apakah Implementasi Pendekatan Analisis Nilai dapat diterapkan pada pengajaran PPKN? Jika dapat bagaimanakah peranannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PPKN?. Apakah Implementasi Pendekatan Analisis Nilai dapat digunakan untuk melakukan pembinaan nilai dan penalaran moral serta sikap sebagai salah satu bagian dari pengajaran Pendidikan Pancasila di sekolah? Adakah pertimbangan lain dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan secara berdaya dan berhasil guna?.

Kontribusi yang mungkin diberikan melalui penelitian yang didesign dengan Implementasi Pendekatan Analisis Nilai, antara lain : (1) memberikan dorongan kepada guru agar membiasakan mengajar penggunaan model belajar yang bermakna sesuai dengan misi dan ciri PPKN sebagai pendidikan nilai dan moral serta norma Pancasila ; (2) membangkitkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran PPKN, terutama pada aspek penalaran nilai-moral.

Untuk mengetahui kerangka berfikir Implementasi Pendekatan ANNIL dalam pembelajaran PPKN dijelaskan pada gambar berikut ini :



Gambar 01. Kerangka Berfikir Implementasi Pendekatan ANNIL Dalam Pembelajaran PPKN

B. Ruang Lingkup dan Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang berfokus pada Implementasi Pendekatan Analisis Nilai (ANNIL) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKN). Implementasi Pendekatan Analisis Nilai dalam penelitian ini meliputi : Pendekatan pengenalan konsep nilai moral; dan pendekatan penalaran nilai-moral sesuai dengan pokok bahasan yang disajikan. Untuk pengenalan konsep nilai-moral diimplementasikan analisis nilai dengan penilaian positif-negatif melalui analisis cerita/kasus dan untuk penalaran nilai moral diimplementasikan analisis nilai melalui analisis cerita/pelakonan.

Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Dasar Isola I Kotamadya Bandung pada kelas V Caturwulan I. Implementasi Pendekatan Analisis Nilai ini dilakukan pada pembelajaran pokok bahasan persamaan hak dan kewajiban dan tata krama.

Bertolak dari latar belakang masalah dan ruang lingkup penelitian, maka dapatlah dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah: *“Bagaimanakah diimplementasikan Pendekatan Analisis Nilai dalam pembelajaran PPKN pada siswa kelas V sesuai dengan pokok bahasan dari kurikulum PPKN 1994”*. Fokus penelitian ini lebih lanjut diarahkan pada permasalahan yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran umum tentang profil awal pembelajaran PPKN pada SD Isola I Kotamadya Bandung ?
2. Bagaimanakah kualitas pengajaran guru dalam pembelajaran PPKN sebagai pendidikan umum untuk seluruh siswa dengan mengimplementasikan Pendekatan Analisis Nilai?
3. Bagaimanakah interaksi/respon siswa dalam pembelajaran PPKN yang dilaksanakan dengan Implementasi Pendekatan Analisis Nilai ?